

**MODEL PERENCANAAN DELIBERATIF
UNTUK KELOMPOK RENTAN
DI KABUPATEN TEGAL**

Disertasi



**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Doktor**

Oleh:

MUHAMMAD FARIED WAJDY

14020119520031

**PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

MODEL PERENCANAAN DELIBERATIF UNTUK KELOMPOK RENTAN DI KABUPATEN TEGAL

Oleh :
Muhammad Faried Wajdy
NIM. 14020119520031

Tim Promotor
Telah Disetujui Oleh :

Promotor



Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.

Co Promotor I

Co Promotor II



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin



Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin
NIP. 196908221994031003

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

MODEL PERENCANAAN DELIBERATIF UNTUK KELOMPOK RENTAN DI KABUPATEN TEGAL

Oleh :
Muhammad Faried Wajdy
NIM. 14020119520031

Tim Penguji
Telah Disetujui Oleh :

Dr. Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si.



.....

Dr. Drs. Ratminto, MPol. Admin.



.....

HALAMAN PERSEMBAHAN

*"Kepada **Istriku tersayang Dewi Milasari**, pendamping jiwaku. Gelar ini hanyalah aksara, namun kesabaran dan kasih sayangmu dalam menopang langkahku adalah makna yang sesungguhnya. Disertasi ini kusembahkan sepenuhnya untukmu, yang dengan cintamu mampu mengubah setiap keluhku menjadi peluh yang penuh arti. Kau adalah alasan mengapa aku tak pernah memilih untuk menyerah..."*

*Kepada **Anak-anakku tersayang Muhammad Fairuz El Mishry; Shidqy Baihaqy El Muhammady; dan Muhammad Abqory Alfaroby**, lembaran-lembaran ini adalah bukti bahwa waktu yang sempat tercuri dari kebersamaan kita tidaklah sia-sia. Ayah ingin kalian tahu bahwa ilmu adalah cahaya yang takkan pernah padam. Jadilah pemimpi yang tangguh, penjelajah ilmu yang tekun, dan ingatlah selalu: tidak ada puncak yang terlalu tinggi untuk didaki selama kita memiliki niat tulus dan kerja keras sebagai bekalnya. Kemenangan ini adalah milik kita bersama."*

INSPIRASI TEMA PENELITIAN

Lulu Khairunnida (47 tahun), adik kandungku terlahir sebagai tuna wicara, tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dan diinginkan, seperti Kakak Adiknya yang terlahir normal.

Bahasa isyarat terbatas yang bisa dilakukannya untuk berkomunikasi, yang itupun hanya dapat dipahami oleh Ayah (Ayah), Emah (Ibu) dan Kakak Adik Kandungnya saja.

Terkadang keluar sedikit teriakan dan dia menangis ketika kami pun tidak mampu memahami apa yang diungkapkannya...

*Keterbatasan adikku Lulu Khairunnida, Sang Ahli Syurga (kami sekeluarga sering menyebutnya) telah menginspirasi saya untuk menulis penelitian tentang **Perencanaan Deliberatif untuk Kelompok Rentan, yaitu Perencanaan Pembangunan Yang Lebih Mampu Mendengar, Memahami dan Mengakomodasi Kepentingan Kelompok Rentan ...***

ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dibuat dan diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat tulisan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini terdapat unsur-unsur plagiasi atau jiplakan, maka saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Februari 2026

Muhammad Faried Wajdy

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan tugas akhir disertasi dengan judul “Model Perencanaan Deliberatif untuk Kelompok Rentan di Kabupaten Tegal” dapat terselesaikan sebagai salahsatu syarat guna memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Berbagai cerita baik itu kendala, tantangan maupun kemudahan yang peneliti alami selama sekian waktu proses penyusunan penelitian Disertasi ini. Namun, peneliti menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan disertasi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak yang selalu setia mendampingi peneliti selama proses panjang masa perkuliahan di Doktoral Administrasi Publik Universitas Diponegoro.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada seluruh pihak yang telah membantu serta memberikan dorongan dalam menyelesaikan Disertasi selama ini. Semoga segala apa yang telah diberikan tercatat menjadi bernilai ibadah dan mendapatkan rridlo dari Allah SWT. Ucapan terima kasih yang tulus ikhlas, tak terhingga peneliti sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., sebagai Rektor Universitas Diponegoro serta seluruh civitas akademika yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di tempat yang luar biasa, Program Studi Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
2. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro sekaligus sebagai co Promotor yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di lingkungan kampus *world class faculty, orange* FISIP dan membimbing penulisan Disertasi dengan penuh perhatian.

3. Dr. A.P. Dra. Tri Yuniningsih, M.Si., sebagai Ketua Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang telah menerima dengan baik peneliti selama berkuliah serta tak pernah lelah mengajarkan ilmu administrasi maupun ilmu dalam beretika kepada peneliti selama perkuliahan;
4. Dr. Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik (DAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Penguji Internal yang telah memfasilitasi peneliti untuk melalui berbagai tahapan administrasi sampai terselesaikannya studi.
5. Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, MT selaku Promotor Bimbingan Disertasi peneliti yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi yang sangat tinggi di saat saat kritis proses (perjuangan) penyusunan Disertasi sampai dengan selesainya studi di Program Studi Doktoral Administrasi Publik ini.
6. Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si. sebagai co Promotor Bimbingan Disertasi peneliti yang dengan penuh perhatian membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi hingga selesainya penulisan Disertasi ini.
7. Almarhumah Ibu Dr. Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si. selaku Penguji sekaligus Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik (DAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang sangat sabar dan ikhlas mendorong, membimbing, dan mengarahkan serta memberikan motivasi yang sangat tinggi agar penulis mampu menyelesaikan studi Doktoral ini, semoga Allah SWT mengampuni segala khilaf dan menerima amal ibadahnya ... aamiin ;
8. Dr. Drs. Ratminto, M.Pol. Admin., selaku Penguji Eksternal yang telah memberikan saran dan catatan kritis untuk penyempurnaan penulisan Disertasi ini.
9. Seluruh staf pegawai di lingkungan Doktoral Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang telah

membantu peneliti dalam pelayanan akademik sehingga perkuliahan ini dapat terselesaikan;

10. Almarhum Apah, Emah, Almarhumah Teteh, Istriku tersayang Dewi Milasari, Anakku Fairuz, Anakku Shidqy, dan Anakku Alby serta Kakak Adik (terkhusus Adikku Inspirasiku Lulu Khairunnida, Sang Ahli Syurga) dan keponakanku semuanya, terimakasih tak terhingga atas support lahir batinnya.
11. Teman-teman Sekretaris, Para Kabid dan seluruh Keluarga Besar Bappedalitbang Kabupaten Tegal, terimakasih atas dukungan yang luar biasa buat Pak Kabannya yang juga telah menjadi saksi perjuangan sampai titik darah penghabisan hingga selesainya studi di Doktoral Administrasi Publik ini.
12. Saudara saudaraku dari Disabilitas, perwakilan Perempuan dan Anak serta seluruh pihak yang telah memberikan data dan informasi penting selama peneliti melakukan penelitian, semoga Allah SWT membalas dengan limpahan kebaikan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini jauh dari makna sempurna, karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti. Demikian harapan yang peneliti persembahkan, semoga disertasi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ilmu di masa yang akan mendatang.

Semarang, Februari 2026

Muhammad Faried Wajdy

NIM. 14020119520031

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan di Indonesia melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang telah berlangsung 20 tahun lamanya sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang antara lain menerapkan pendekatan perencanaan partisipatif belum mampu memenuhi dan mengakomodasi usulan-usulan dari masyarakat terutama kelompok-kelompok rentan. Keterbatasan ruang dan wadah aspirasi menyebabkan kelompok rentan seringkali tidak dapat menyampaikan aspirasi dan usulannya dalam musyawarah pembangunan daerah yang menyebabkan berbagai kelompok rentan tersebut seperti kelompok perempuan, kelompok anak, dan kelompok disabilitas masih belum mendapatkan keberpihakan dalam proses pembangunan. Tindakan korektif diperlukan guna mencapai demokrasi yang lebih setara dan deliberatif salahsatunya melalui pendekatan lain dalam teori perencanaan rasional komunikatif yaitu perencanaan deliberatif.

Penelitian ini mengkaji perencanaan deliberatif untuk kelompok rentan di Kabupaten Tegal, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, dan merumuskan model pengembangan perencanaan deliberatif untuk kelompok rentan di Kabupaten Tegal dengan strategi penerapannya, serta ditujukan untuk merekonstruksi kembali teori perencanaan deliberatif dalam konteks musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan situs penelitian di Kabupaten Tegal. Pemilihan narasumber informan didasarkan atas teknik *purposive sampling* sejumlah 32 informan. Teknis analisis data menggunakan moel analisis tematik Braun & Clarke yang terintegrasi dengan aplikasi analisis olah data kualitatif Atlas.TI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori Perencanaan Deliberatif termanifestasi dalam kebijakan Musrenbang Tematik Pemerintah Kabupaten Tegal yang khas dimana kepesertaannya dikhususkan kepada kelompok-kelompok rentan dan menjadi bentuk antitesis atas paradigma perencanaan partisipatif yang selama ini dipergunakan dalam Musrenbang Daerah. Peneliti memberikan rekomendasi model pengembangan perencanaan deliberatif untuk kelompok rentan dengan menekankan pada dimensi dukungan politik kepala daerah dan elite daerah, kesiapan sumber daya, dan komitmen dari peserta perencanaan.

Kata Kunci:

Perencanaan Deliberatif, Kelompok Rentan, Perencanaan Pembangunan

ABSTRACT

Development planning in Indonesia through the development planning forum (musrenbang) which has been going on for 20 years since the enactment of Law Number 5 of 2004 on the National Development Planning System by implementing a participatory planning approach has not been able to meet and accommodate proposals from the community, especially vulnerable groups. With limited space and aspiration forums, vulnerable groups are often unable to convey their aspirations and proposals in regional development which causes various vulnerable groups such as women's groups, children's groups, and disability groups to continue to experience discrimination. In achieving a more equal and deliberative democracy, there is another approach in the theory of communicative rational planning, namely deliberative planning.

This study examines deliberative planning for vulnerable groups in Tegal Regency, identifies driving and inhibiting factors, and formulates a deliberative planning development model for vulnerable groups in Tegal Regency with its implementation strategy, and is intended to reconstruct the theory of deliberative planning in development planning forums (musrenbang) in Indonesia. This study used a descriptive qualitative approach, with the research site in Tegal Regency. The selection of informants was based on a purposive sampling technique with 32 informants. Data analysis used the Braun & Clarke thematic analysis model integrated with the qualitative data analysis application Atlas.TI.

The results of the study indicate that Deliberative Planning Theory is reflected in the policies of the Tegal Regency Government's distinctive Thematic Development Planning Forum (Musrenbang), where participation is limited to vulnerable groups and is antithetical to the participatory planning paradigm that has been used in the Regional Development Planning Forum (Musrenbang Daerah). The researcher provides recommendations for a deliberative planning development model for vulnerable groups by emphasizing the dimensions of political support from regional heads and elites, resource readiness, and commitment from planning participants.

Keywords:

Deliberative Planning, Vulnerable Groups, Development Planning

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
INSPIRASI TEMA PENELITIAN	v
ORIGINALITAS PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Permasalahan	31
1.3. Rumusan Masalah	32
1.3. Tujuan Penelitian.....	33
1.4. Manfaat Penelitian.....	34
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	34
1.4.2. Manfaat Praktis.....	34
 BAB II REVIEW LITERATUR KOMPREHENSIF	 36
2.1. Studi Penelitian Terdahulu	36
2.2. Kerangka Teoritis	55
2.2.1. Administrasi Publik	55
2.2.2. Paradigma Administrasi Publik	59

2.2.3. <i>Governance</i>	63
2.2.4. Perencanaan Pembangunan.....	68
2.2.5. Perencanaan Deliberatif.....	98
2.2.6. Desentralisasi dan Pembangunan Daerah	105
2.2.7. <i>Cross-Sector Collaboration</i>	107
2.2.8. Kelompok Rentan.....	110
2.2.9. <i>Push and Pull Factor Analysis</i>	114
2.3. Argumentasi Penelitian.....	118
2.4. Kerangka Pikir Peneliti.....	120
BAB III METODE PENELITIAN	121
3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	121
3.1.1. Tipe Penelitian.....	121
3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	123
3.2. Situs Penelitian.....	124
3.3. Fokus Penelitian	125
3.4. Fenomena Penelitian dan Operasionalisasi	126
3.5. Sumber Data	131
3.5. Teknik Koleksi Data.....	134
3.6. Informan Penelitian	135
3.7. Uji Keabsahan Data.....	137
3.8. Teknik Analisis Data.....	141
BAB IV GAMBARAN KONTEKS DAN SETTING PENELITIAN	149
4.1. Gambaran Umum	149
4.2. Kelembagaan, Kewenangan, dan Aparatur Daerah.....	161
4.3. Kinerja Pemerintah Daerah.....	167
BAB V TEMUAN DAN PEMBAHASAN KOMPREHENSIF.....	168
5.1. Temuan Penelitian	168
5.1.1. Perencanaan Deliberatif untuk Kelompok Rentan di	

Kabupaten Tegal.....	168
5.1.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Perencanaan	
Deliberatif untuk Kelompok Rentan di Kabupaten Tegal	249
5.1.3. Model <i>Existing</i> Perencanaan Deliberatif untuk Kelompok	
Rentan di Kabupaten Tegal.....	290
5.2. Pembahasan Komprehensif	299
5.2.1. Analisis Perencanaan Deliberatif untuk Kelompok	
Rentan di Kabupaten Tegal.....	299
5.2.2. Analisis Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	
Perencanaan Deliberatif untuk Kelompok Rentan di	
Kabupaten Tegal.....	325
5.2.3. Kritik Teori dan Model Pengembangan Perencanaan Deliberatif	
untuk Kelompok Rentan di Kabupaten Tegal.....	339
BAB VI PENUTUP	431
6.1. Simpulan.....	431
6.2. Implikasi Penelitian.....	433
6.3. Saran.....	438
6.4. Keterbatasan Penelitian	440
DAFTAR PUSTAKA	442
LAMPIRAN	457

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) Perempuan Lanjut Usia Terlantar (2023).....	13
Tabel 1.2.	Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terdata (2023).....	15
Tabel 1.3.	Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (2023).....	16
Tabel 1.4.	Rekapitulasi Anak <i>Drop Out</i> (DO) Pendidikan, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Belum Pernah Bersekolah (BPB).....	18
Tabel 1.5.	Hasil Rekapitulasi Kota/Kabupaten Kategori Sangat Tinggi	19
Tabel 1.6.	Rekapitulasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023.....	21
Tabel 1.7.	Jenis dan Jumlah Disabilitas Terdata di Kabupaten Tegal.....	23
Tabel 1.8.	Pagu Anggaran Program/Kegiatan Kelompok Rentan Kabupaten Tegal.....	24
Tabel 1.9.	Keterwakilan Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang Kabupaten Tegal Tahun 2024.....	27
Tabel 1.10.	Usulan Kegiatan Musrenbang bagi Anak dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2024	27
Tabel 2.1.	Karakteristik <i>Governance</i>	65
Tabel 2.2.	Komparasi Perencanaan Deliberatif dan Perencanaan Partisipatif.....	92

Tabel 2.3.	Perbedaan Aplikatif dalam Proses Perencanaan Deliberatif dan Proses Perencanaan Partisipatif.....	96
Tabel 3.1.	Fenomena, Fokus, dan Aspek Penelitian	129
Tabel 3.2.	Daftar Informan Penelitian	137
Tabel 4.1.	Angka Kemiskinan Kabupaten Tegal.....	155
Tabel 4.2.	Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak	158
Tabel 4.3.	Data Layanan Anak dan Penyandang Disabilitas.....	160
Tabel 4.4.	Jenis dan Jumlah Disabilitas Terdata di Kabupaten Tegal.....	161
Tabel 4.5.	ASN dan Non-ASN Bappedalitbang Kabupaten Tegal.....	166
Tabel 4.6.	Nilai SAKIP Kabupaten Tegal Tahun 2020-2023	167
Tabel 4.7.	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal.....	167
Tabel 5.1.	Analisis Faktor Pendorong.....	328
Tabel 5.2.	Analisis Faktor Penghambat	332
Tabel 5.3.	Analisis SWOT Kualitatif.....	334
Tabel 5.4.	Analisis SWOT Kuantitatif.....	336
Tabel 5.5.	Kritik Subtansial Teori Perencanaan Deliberatif.....	363
Tabel 5.6.	Komparasi Model Hasil Penelitian	375
Tabel 5.7.	Komparasi Model Perencanaan Berdasarkan Elemen Healey.....	381
Tabel 5.8.	Teknis Pemetaan Aktor dan Peranan Operasional.....	404
Tabel 5.9.	Alur Proses Operasionalisasi Model Perencanaan Deliberatif	406
Tabel 5.10.	Indikator Teknis Keberhasilan Perencanaan Deliberatif	408
Tabel 5.11.	Teknis Feedback Loop (Umpan Balik Adaptif)	410
Tabel 5.12.	Risiko Implementasi dan Pengendalian.....	411
Tabel 5.13.	Instrumen dan Sumber Data.....	412

Tabel 5.14.	Ceklist Implementasi (SOP Sederhana).....	414
Tabel 5.15.	Indikator Keberhasilan Aksesibilitas Informasi	418
Tabel 5.16.	Indikator Keberhasilan Syarat Kontekstual Keterlibatan Stakeholder	420
Tabel 5.17.	Indikator Keberhasilan Syarat Kontekstual Pelatihan dan Pemberdayaan.....	422
Tabel 5.18.	Indikator Keberhasilan Syarat Kontekstual Penyusunan Agenda yang Relevan.....	424
Tabel 5.19.	Indikator Keberhasilan Syarat Kontekstual Komitmen Politik	427

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Perencanaan Penganggaran Daerah	4
Gambar 1.2.	Fase Perencanaan Deliberatif Menurut Healey (1997).....	11
Gambar 1.3.	Proporsi Pagu Anggaran RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2017- 2023 Berdasarkan Hasil Musrenbang	21
Gambar 1.4.	Jumlah Kehadiran Kelompok Rentan dalam Musrenbang Guna Penyusunan RKPD Tahunan di Kabupaten Tegal	26
Gambar 2.1.	Pemetaan Tema Penelitian Perencanaan Deliberatif.....	37
Gambar 2.2.	Hasil Pemetaan Penelitian Perencanaan Deliberatif.....	54
Gambar 2.3.	Model-Model Perencanaan Prosedural	73
Gambar 2.4.	Tipologi Perencanaan dan Keterkaitannya	78
Gambar 2.5.	Manifestasi Perencanaan Komunikatif	85
Gambar 2.6.	Panduan Pelaksanaan Perencanaan Deliberatif.....	86
Gambar 2.7.	Panduan Pelaksanaan Perencanaan.....	88
Gambar 2.8.	Panduan Pelaksanaan Perencanaan Deliberatif.....	90
Gambar 2.9.	Model Force Fields Analysis Lewin	115
Gambar 2.10.	10 Fase dalam Perumusan Strategi	117
Gambar 2.11.	Kerangka Teori Penelitian	119
Gambar 2.12.	Kerangka Pikir Peneliti	120
Gambar 3.1.	Analisis Model Interaktif Analisis Data.....	144
Gambar 3.2.	Integrasi Teknis Analisis Tematik dan Atlas.Ti.	147
Gambar 4.1.	Peta Administratif Kabupaten Tegal	150

Gambar 4.2.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	151
Gambar 4.3.	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal.....	152
Gambar 4.4.	Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal	153
Gambar 4.5.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tegal.....	154
Gambar 4.6.	Grafik IPM dan IPG Kabupaten Tegal.....	156
Gambar 4.7.	Grafik IDG Kabupaten Tegal	157
Gambar 4.8.	Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Tegal	165
Gambar 5.1.	Faktor Dukungan Kepala Daerah	250
Gambar 5.2.	Faktor Legitimasi Pemangku Kepentingan	257
Gambar 5.3.	Faktor Surat Edaran Elite Daerah	260
Gambar 5.4.	Faktor Proses Dialog dan Negosiasi Interaktif.....	265
Gambar 5.5.	Faktor Komitmen Pegawai.....	269
Gambar 5.6.	Faktor Ketiadaan Pagu Indikatif.....	275
Gambar 5.7.	Faktor Keterbatasan Waktu Kegiatan	278
Gambar 5.8.	Faktor Minim Pengendalian Realisasi Usulan.....	281
Gambar 5.9.	Faktor Distrust Kelompok Rentan	286
Gambar 5.10.	Model Eksisting Perencanaan Deliberatif untuk Kelompok Rentan di Kabupaten Tegal dalam Pelaksanaan Musrenbang Tematik	292
Gambar 5.11.	Proses Perencanaan Deliberatif	299
Gambar 5.12.	Musrenbang Tematik Kelompok Anak Tahun 2024	300
Gambar 5.13.	Surat Edaran Musrenbang Tematik Bappedalitbang.....	303
Gambar 5.14.	Undangan Musernbang Tematik Tahun 2024 untuk Kelompok Anak.....	306

Gambar 5.15.	Lampiran Daftar Penerima Undangan Musrenbang Tematik Kelompok Anak Tahun 2024.....	308
Gambar 5.16.	Materi Pemaparan Bappedalitbang dalam Musrenbang Tematik Kelompok Difabel Tahun 2024	311
Gambar 5.17.	Lampiran Daftar Penerima Undangan Msurenbang Tematik Kelompok Difabel Tahun 2024	316
Gambar 5.18.	Lampiran Daftar Penerima Undangan Musrenbang Tematik Kelompok Perempuan Tahun 2024.....	316
Gambar 5.19.	Proses Pelaksanaan Musrenbang Tematik Kelompok Perempuan dipandu Moderator Tenaga Ahli Perencana	319
Gambar 5.20.	Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musrenbang Tematik Kelompok Anak Tahun 2023	321
Gambar 5.21.	Korelasi Antar Faktor Pendorong Perencanaan Deliberatif.....	327
Gambar 5.22.	Korelasi Antar Faktor Penghambat Perencanaan Deliberatif...	331
Gambar 5.23.	Posisi Kuadran Hasil Analisis SWOT.....	337
Gambar 5.24.	Proses Perencanaan Deliberatif	339
Gambar 5.25.	Institutional Isomorphic	344
Gambar 5.26.	Usulan Teori Perencanaan Deliberatif berbasis Karakteristik Lokal	367
Gambar 5.27.	Perencanaan Deliberatif Berbasis Faktor Lingkungan	369
Gambar 5.28.	Model Perencanaan Partisipatif di Indonesia	373
Gambar 5.29.	Usulan Model Perencanaan Deliberatif untuk Kelompok Rentan Berbasis Karakteristik Lokal	386

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	<i>Interview Guide</i> (Pedoman Wawancara).....	455
Lampiran 2.	Foto (Dokumentasi)	460

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian dari rencana keuangan pemerintahan di tingkat daerah yang berlaku selama satu tahun.
ASN	Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Atlas.Ti	Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam mengolah data kualitatif.
Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
<i>Density</i>	Banyaknya keterkaitan suatu <i>nodes</i> /faktor/aspek dengan faktor/aspek lainnya dalam aplikasi Atlas.Ti.
<i>Grounded</i>	Banyaknya sitasi yang muncul selama proses wawancara peneliti dengan setiap narasumber dalam aplikasi Atlas.Ti.
IGA	(<i>Innovative Government Award</i>) merupakan apresiasi pemerintah pusat kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan cara-cara inovatif.
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

KemenPAN & RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
KUA-PPAS	Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara merupakan dokumen perencanaan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menjelaskan kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan dan prioritas anggaran sementara. KUA-PPAS berfungsi sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang mencakup alokasi anggaran berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan
Musrenbang	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan adalah forum untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah yang diselenggarakan di berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional.
OPD	Organisasi Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah (Perangda) adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Pagu Indikatif	Pagu indikatif adalah perkiraan alokasi dana sementara yang diberikan untuk suatu unit atau program dalam anggaran, yang masih bisa berubah sebelum anggaran final disetujui.
Pelayanan Publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pembangunan Daerah	Usaha yang sistematis dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara melalui

berbagai kebijakan antara lain peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

PERDA	Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
PerKaDa	Peraturan Kepala Daerah yang meliputi Peraturan Bupati untuk daerah tingkat Kabupaten, Peraturan Walikota untuk daerah tingkat Kota, dan Peraturan Gubernur untuk daerah tingkat provinsi.
PIK	Pagu Indikatif Kecamatan adalah sejumlah pagu maksimal anggaran yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan untuk wilayah kecamatan dengan mekanisme partisipatif melalui musrenbang kecamatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan jangka waktu periode 5 tahun.
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan jangka waktu periode 20 tahun.
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SDM	Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan.
SIPD	Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah inovasi yang menyampaikan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya dalam satu sistem yang terintegrasi.
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada lingkup kerja yang dipimpinnya.
<i>Stakeholder</i>	Semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi.
Triangulasi	Adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.